

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 12/PRT/M/2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE  
PERKOTAAN

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

A. PENDAHULUAN

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi pengelolaan sistem drainase perkotaan meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sistem drainase perkotaan meliputi aspek teknis maupun nonteknis. Pada prinsipnya pemantauan dan evaluasi sendiri merupakan bagian penilaian terhadap kinerja sistem drainase perkotaan secara keseluruhan. Dimana hasil pemantauan dan evaluasi sendiri akan digunakan sebagai bahan masukan untuk rencana tindak turun tangan dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan.

B. PENGERTIAN

Dalam tata cara ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaporan adalah kegiatan pengumpulan dan penyajian data kinerja dan informasi pengelolaan sistem drainase perkotaan untuk mengetahui kemajuan pekerjaan dan hasil penanganan banjir dan genangan serta dijadikan dasar untuk perbaikan dan rencana pengembangan sesuai prosedur yang berlaku;
2. Daerah genangan adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat.
3. Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
4. Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.
5. Saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder.
6. Normalisasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.

## C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

### 1. Pemantauan

Tujuan pelaksanaan pemantauan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan sistem drainase perkotaan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemantauan terhadap pengelolaan sistem drainase perkotaan dilakukan dengan cara langsung (inspeksi), maupun secara tidak langsung melalui data/laporan harian maupun mingguan. Pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat pengelola guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase perkotaan, sedangkan Pemantauan secara tidak langsung dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan pengelolaan sistem drainase perkotaan.

Pemantauan pengelolaan sistem drainase perkotaan dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan baik yang bersifat teknis dan nonteknis.

Pemantauan pengelolaan sistem drainase perkotaan dilakukan oleh penyelenggara pengelolaan sistem drainase perkotaan dengan menggunakan suatu sistem informasi manajemen pengelolaan sistem drainase perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Obyek pemantauan pengelolaan sistem drainase perkotaan berupa teknis yang terdiri dari kondisi dan fungsi saluran dan bangunan pelengkap, karakteristik genangan, sistem pengaliran dan kapasitas sistem drainase, maupun non-teknis yang meliputi kelembagaan, manajemen, pembiayaan, peran masyarakat, dan hukum pengaturan.

Proses pemantauan dapat dilakukan secara rutin setiap hari, setiap minggu dan paling lama tiap bulan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan pengelolaan sistem drainase perkotaan sesuai dengan kewenangannya:

- a. Pemerintah melaksanakan pemantauan pengelolaan sistem drainase perkotaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi melalui Dinas/Badan/Unit pengelola teknis terkait tingkat provinsi dan/atau BUMN/BUMD/Swasta.
- b. Pemerintah Propinsi melaksanakan pemantauan pengelolaan sistem drainase perkotaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan/Unit pengelola teknis Teknis terkait tingkat Kabupaten/Kota dan/atau BUMN/BUMD/Swasta.

- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan pengelolaan sistem drainase perkotaan yang dilaksanakan oleh Pengembang/BUMD Kabupaten/Kota dan/atau pengelolaan sistem drainase kawasan khusus.

Pemerintah Propinsi harus membentuk unit pemantauan dan pembinaan pengelolaan sistem drainase perkotaan untuk membantu terciptanya pemantauan pengelolaan sistem drainase perkotaan di masing-masing propinsi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 1) Pemantauan Teknis

Pemantauan aspek teknis dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan sesuai dengan sasaran perencanaan awal. Pemantauan aspek teknis meliputi:

- a. Kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan. Baik itu saluran drainase maupun bangunan pelengkap. Pada saluran drainase pemantauan dilakukan mengacu pada peta jaringan drainase dan skema sistem yang dilengkapi data: pola aliran, elevasi dasar saluran, dimensi saluran, kapasitas saluran, kemiringan saluran, material saluran dan tahun pembangunan.

Sedangkan pada bangunan pelengkap dilakukan pemantauan operasi dan pemeliharaan rumah pompa dan pompa banjir, pintu air, kolam retensi, gorong-gorong, dll. Pemantauan dimensi rumah pompa, elevasi inlet dan outlet pompa, kapasitas pompa dan jenis pompa serta instalasi mekanikal elektrikal pompa banjir. Pemantauan dimensi dan jumlah pintu air, elevasi dasar, bukaan normal dan maksimal pintu air, kapasitas, jenis, kedalaman air dan bahan pintu air serta instalasi mekanikal elektrikal pintu air. Pemantauan pada saluran dan bangunan pelengkap dilakukan dengan menggunakan peralatan menggunakan alat pengukuran dan alat pemantauan yang dikalibrasi.

- b. Karakteristik genangan. Berupa pemantauan lokasi genangan, korban jiwa dan kerugian material, luas, tinggi, lama genangan dan intensitas genangan dilengkapi koordinat lokasi genangan serta peta genangan.

- c. Pemantauan kualitas air meliputi pengukuran terhadap beberapa parameter mutu air dan menetapkan status mutu air untuk semua klasifikasi berdasarkan baku mutu air yang ditetapkan. Agar mutu air sungai dapat diketahui dan tetap terjaga dari resiko pencemaran yang dapat terjadi baik secara alami maupun akibat aktifitas masyarakat.
- 2) Pemantauan non teknis
  - 3) Pemantauan aspek non teknis dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan sesuai dengan sasaran perencanaan awal.

Pemantauan aspek non teknis meliputi:

- a. Pemantauan kelembagaan
  - a) Bentuk organisasi pengelola drainase perkotaan
  - b) Struktur organisasi dan uraian kerja
  - c) Badan pengawas pengelola;
- b. Pemantauan Manajemen pembangunan
  - a) Data pegawai (SDM) menurut jabatan, pengalaman kerja, umur;
  - b) Pendidikan dan pelatihan;
  - c) Tata laksana kerja;
  - d) Standar prosedur operasional; dan
  - e) Rencana Induk.
- c. Pemantauan keuangan
  - a) Rincian biaya investasi pembangunan;
  - b) Rincian biaya operasi dan pemeliharaan; dan
  - c) Peran masyarakat dan swasta dalam pembiayaan
- d. Pemantauan Peran masyarakat dan swasta
  - a) Keberadaan forum masyarakat yang melakukan pemantauan pengelola sistem drainase perkotaan; dan
  - b) Pemantauan kewajiban masyarakat dan swasta.
- e. Pemantauan aspek hukum
  - a) Pemantauan terhadap produk peraturan perundangan yang ada, misalnya tentang pengaturan pembuangan sampah ke sungai, saluran dan badan air serta bantaran sungai/saluran;
  - b) Upaya penegakan hukum pengaturan dan penghargaan; dan
  - c) lain-lain.

## 2. Evaluasi

Evaluasi pengelolaan sistem drainase perkotaan adalah mempelajari semua hasil pantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga hasil akhir pengelolaan sistem drainase perkotaan yakni kemanfaatan pembangunan prasarana dan sarana drainase. Dengan dimulainya perencanaan, maka tolok ukur sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi terselenggaranya pengelolaan sistem drainase perkotaan. Tolok ukur itu memuat segala ketentuan Standar, Pedoman, Manual serta SNI, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Evaluasi atas pengelolaan sistem drainase perkotaan itu harus dikembalikan atau diarahkan pada perencanaan yang dituangkan sebagai tolok ukur yang harus dicapai dan ditaati oleh pengelola sistem drainase perkotaan.

Evaluasi dilakukan terhadap pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi terhadap pengelolaan sistem drainase perkotaan, dengan membandingkan tolok ukur/kriteria/standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu pada tahap awal, yaitu perencanaan.

Evaluasi selalu dibandingkan dengan tolok ukur yang sudah disiapkan dalam perencanaan sebelumnya. Perencanaan tidak dapat sama persis dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil Evaluasi ini akan dijadikan bahan kajian dalam menyusun kebijaksanaan penyelenggara di masa mendatang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Evaluasi terhadap aspek teknis dilakukan setiap 6-12 bulan sekali.

Evaluasi bidang aspek nonteknis dilakukan untuk:

1. Bidang administrasi keuangan berupa audit setiap 6-12 bulan sekali.
2. Bidang kelembagaan dan institusi setiap 12 bulan sekali.

(2).Indikator kinerja struktural/teknis meliputi:

- a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana. karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
- b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.

(3).Indikator kinerja non teknis meliputi:

- a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;

- b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
  - c. keuangan yang mencakup pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait drainase;
  - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
  - e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait drainase.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi standar kualitas dan kinerja pelayanan pengelolaan sistem drainase perkotaan:

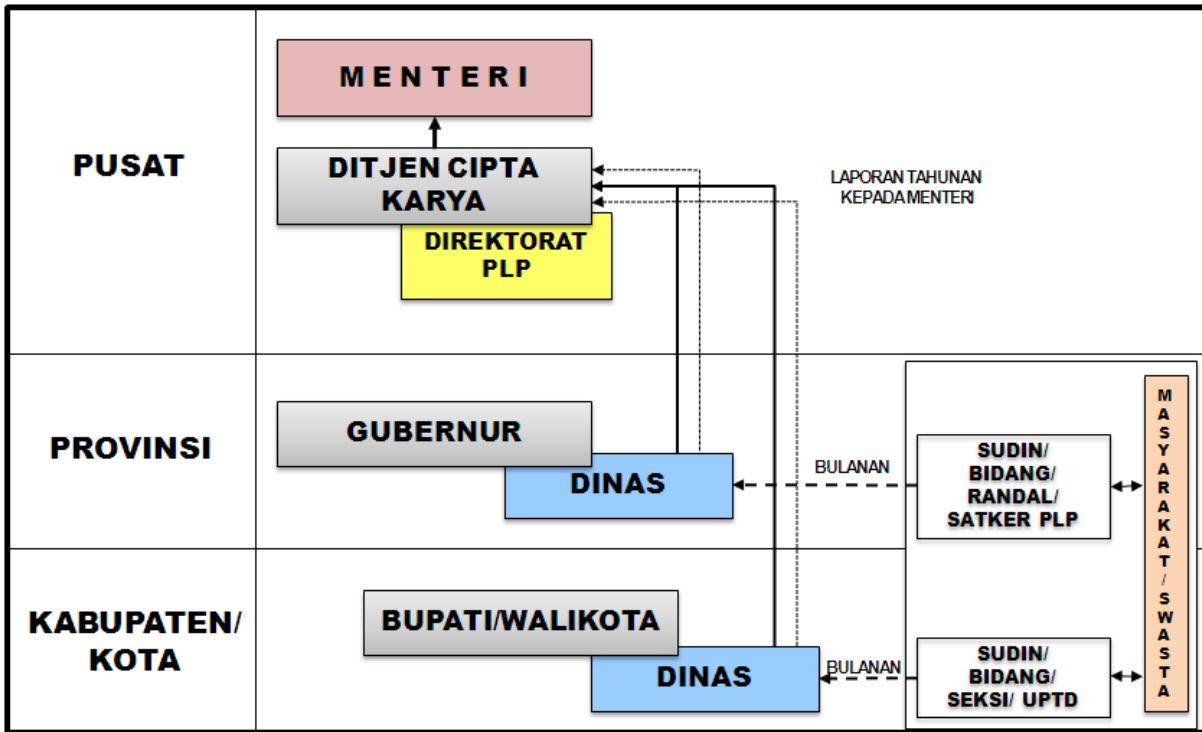
1. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi laporan kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan tingkat kabupaten/kota.
2. Pemerintah propinsi melaksanakan evaluasi laporan kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan tingkat propinsi dan laporan evaluasi kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan dari pemerintah kabupaten/kota.
3. Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan evaluasi laporan kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan tingkat nasional dan laporan evaluasi kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan dari pemerintah propinsi.

Evaluasi pengelolaan sistem drainase perkotaan ini dilaksanakan secara periodik dengan menggunakan suatu sistem informasi manajemen pengelolaan sistem drainase perkotaan.

#### D. PELAPORAN

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sistem drainase perkotaan untuk masa berikutnya. Pelaporan wajib dilakukan oleh penyelenggara pengelolaan sistem drainase perkotaan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penyampaian laporan diatur sesuai bagan hubungan dan tata pelaporan berikut:



**KETERANGAN :**

- Penyampaian Laporan untuk Kegiatan yang dibiayai APBN
- Penyampaian Informasi untuk Kegiatan yang dibiayai APBD Tingkat I/II

Penyampaian laporan diatur sesuai bagan hubungan dan tata pelaporan berikut:

1. Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase perkotaan kepada pemerintah minimal satu kali dalam setahun sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan laporan kepada Bupati/Walikota;
  - b. Penyelenggara tingkat Propinsi menyerahkan laporan kepada Gubernur; dan
  - c. Penyelenggara tingkat Nasional menyerahkan laporan kepada Menteri.
  
2. Pemerintah daerah menyampaikan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase perkotaan yang diterima dari penyelenggara sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas sebagai berikut:
  - a. Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan laporan evaluasi kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas kepada pemerintah propinsi minimal satu kali dalam setahun;
  - b. Pemerintah Propinsi menyampaikan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase perkotaan tingkat

propinsi sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b di atas dan laporan evaluasi kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a di atas kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- c. Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase perkotaan kepada Menteri selambat-lambatnya satu kali dalam tiga bulan.

Laporan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab.

Laporan mencakup hal-hal yang bersifat teknis dan non teknis, yaitu:

- a. Laporan tentang pemanfaatan pembangunan prasarana dan sarana drainase, meliputi: hasil evaluasi terhadap pemanfaatan terhadap prasarana dan sarana drainase
- b. Laporan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase;
- c. Laporan kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan, yang meliputi operasional, pembiayaan, kelembagaan, peran masyarakat/swasta dan hukum pengaturan;
- d. Laporan pemantauan; dan
- e. Laporan hasil evaluasi.



**EVALUASI PEMANFAATAN PEMBANGUNAN  
PRASARANA & SARANA DRAINASE**

1. JENIS PRASARANA : **SISTEM DRAINASE** \_\_\_\_\_
2. TAHUN PEMBANGUNAN : \_\_\_\_\_
3. BIAYA PEMBANGUNAN : \_\_\_\_\_
4. NAMA PENYEDIA JASA : \_\_\_\_\_
5. NAMA LOKASI : \_\_\_\_\_
  - a. KONSULTAN PERENCANA \_\_\_\_\_
  - b. KONTRAKTOR PELAKSANA \_\_\_\_\_
  - c. KONSULTAN PENGAWAS \_\_\_\_\_
6. KABUPATEN/KOTA : \_\_\_\_\_
7. PROVINSI : \_\_\_\_\_
8. HASIL EVALUASI : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
9. NAMA EVALUATOR : \_\_\_\_\_
10. JABATAN EVALUATOR : \_\_\_\_\_
  
11. TANDA TANGAN EVALUATOR : \_\_\_\_\_

**EVALUASI PEMANFAATAN PEMBANGUNAN  
PRASARANA & SARANA DRAINASE**

JENIS PRASARANA : \_\_\_\_\_  
 KABUPATEN/KOTA : \_\_\_\_\_  
 PROVINSI : \_\_\_\_\_  
 TAHUN : \_\_\_\_\_

		SUB BIDANG PRASARANA/ LOKASI	JUMLAH ANGGARAN	PERENCANA	PELAKSANA	KODE FORM
I		SALURAN				
	1					
	2					
	3					
II		KOLAM RETENSI				
	1					
	2					
	3					
III		RUMAH POMPA				
	1					
	2					
	3					
IV		PINTU AIR				
	1					
	2					
	3					
TOTAL ANGGARAN						

HASIL EVALUASI : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NAMA EVALUATOR : \_\_\_\_\_  
 JABATAN EVALUATOR : \_\_\_\_\_

TANDA TANGAN EVALUATOR : \_\_\_\_\_

**PEKERJAAN EVALUASI PEMANFAATAN PEMBANGUNAN  
PRASARANA DAN SARANA DRAINASE PERKOTAAN DI INDONESIA**

DAFTAR ISI

	FORM
i Halaman Judul	
1 Data Perencanaan	1
a Peta Masterplan Drainase Kota/Kabupaten	1a
b Skema Pola Arah Aliran dan Genangan	1b
c Peta Land Subsidence	1c
2 Data Saluran	2
3 Data Kolam Retensi	3
4 Data Rumah Pompa	4
5 Data Pintu Air	5
6 Data Genangan	6
7 Aspek Perundangan Prasarana & Sarana Drainase	7
8 Organisasi Pelaksana O&P	8
9 SDM Pelaksana O&P	9
10 Peran Serta Masyarakat	10
11 Data Lainnya	11
12 Pengumpulan Data Pelengkap	-

**1 PERENCANAAN**

**FORM -1**

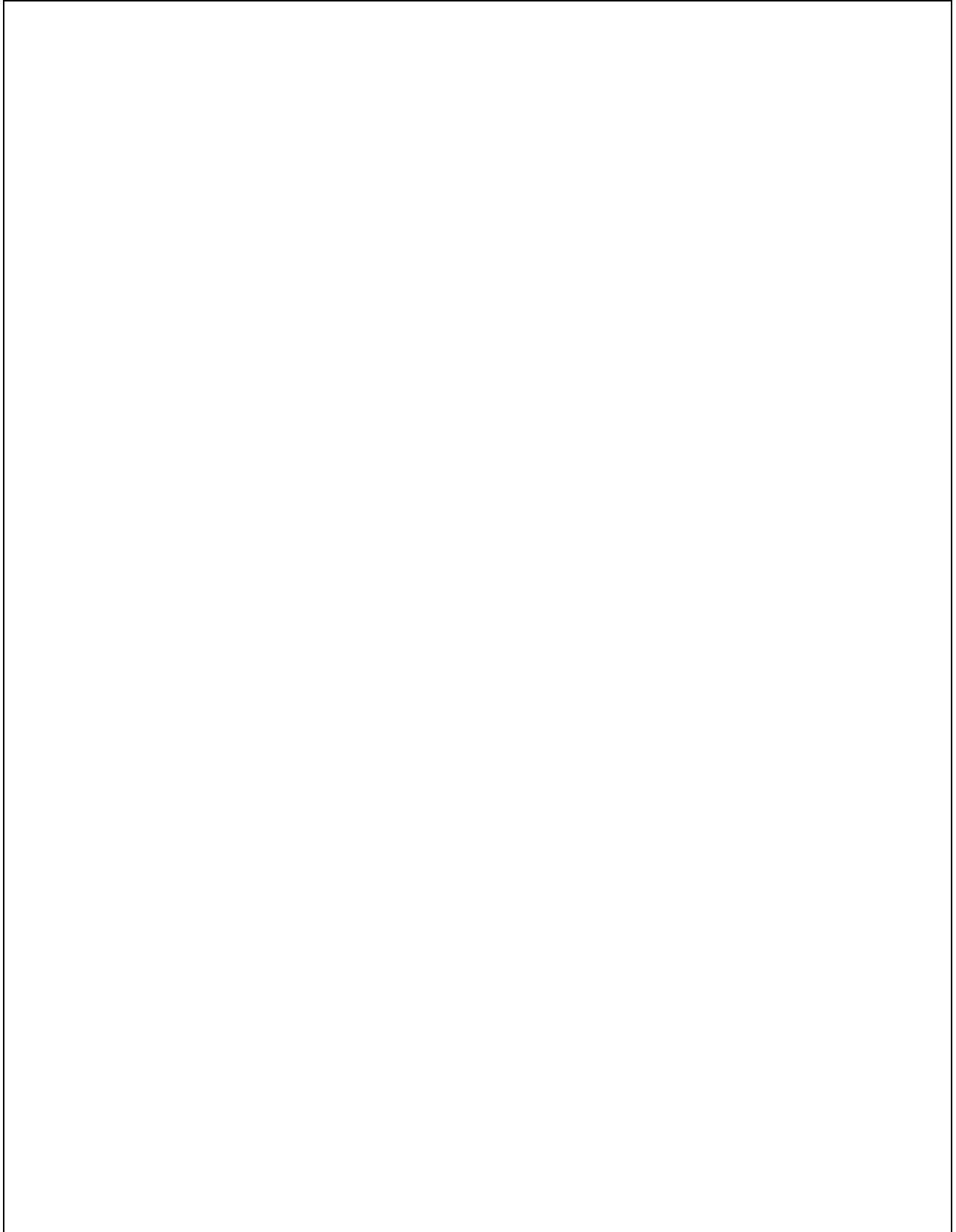
NO			URAIAN	RENCANA/ KRITERIA	KONDISI LAPANGAN & PERMASALAHAN	SARAN & RENCANA TINDAK TURUN TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1		Masterplan Drainase	Dibuat Tahun : Perencana :		
		a	Acuan RTR	Dibuat Tahun : Berlaku Sampai Tahun:		
		b	Peta MP Jaringan Drainase Kota/Kabupaten	Dibuat Tahun : Perencana :		
		c	Peta Pola Aliran Sistem Drainase dan Genangan	Dibuat Tahun : Perencana :		
		d	Peta Land Subsidence/Penurunan Muka Tanah	Dibuat Tahun : Perencana :		
	2		Detail Engineering Design (DED)	Dibuat Tahun : Perencana :		
	3		Program O&P	Dibuat Tahun : Perencana :		
	4		Banjir Rencana	Dari MP / DED		
		a	Perioda Ulang 5 tahun	$Q_5 = \dots\dots\dots m^3/det$		
		b	Perioda Ulang 10 tahun	$Q_{10} = \dots\dots\dots m^3/det$		
		c	Perioda Ulang 25 tahun	$Q_{25} = \dots\dots\dots m^3/det$		
		d	Perioda Ulang 50 tahun	$Q_{50} = \dots\dots\dots m^3/det$		
		e	Perioda Ulang 100 tahun	$Q_{100} = \dots\dots\dots m^3/det$		
	5		Peil Banjir	Dari MP / DED		
		a	Perioda Ulang 5 tahun	$PB = + \dots\dots\dots m$		
		b	Perioda Ulang 10 tahun	$PB = + \dots\dots\dots m$		
		c	Perioda Ulang 25 tahun	$PB = + \dots\dots\dots m$		
		d	Perioda Ulang 50 tahun	$PB = + \dots\dots\dots m$		
		e	Perioda Ulang 100 tahun	$PB = + \dots\dots\dots m$		
	6		Jika Kab/Kota terpengaruh Pasut Air Laut:	Dari MP/DED/Data Pelabuhan		
		a	Air Pasang Laut Tertinggi	+ $\dots\dots\dots m$		
		b	Air Pasang Laut Rata-rata (Mean Sea Level)	+ $\dots\dots\dots m$		
		c	Air Pasang Laut Terendah	+ $\dots\dots\dots m$		

**1A. PETA MASTERPLAN DRAINASE KOTA/KABUPATEN**

**FORM - 1a**

**KOTA/KAB :** \_\_\_\_\_

**PROVINSI :** \_\_\_\_\_

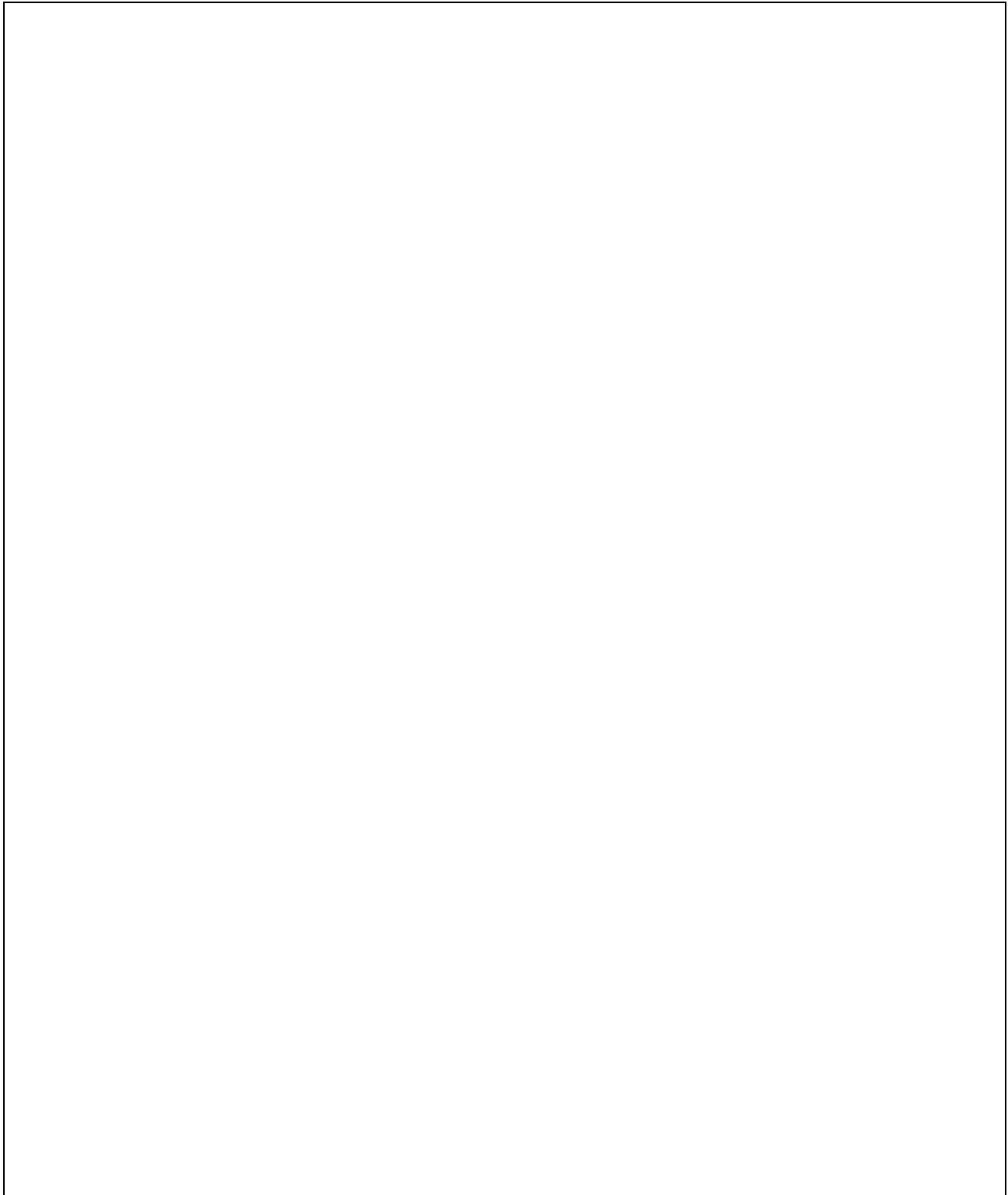


**1B. SKEMA POLA ARAH ALIRAN DAN GENANGAN**

**FORM – 1b**

**KOTA/KAB :** \_\_\_\_\_

**PROVINSI :** \_\_\_\_\_



Keterangan :

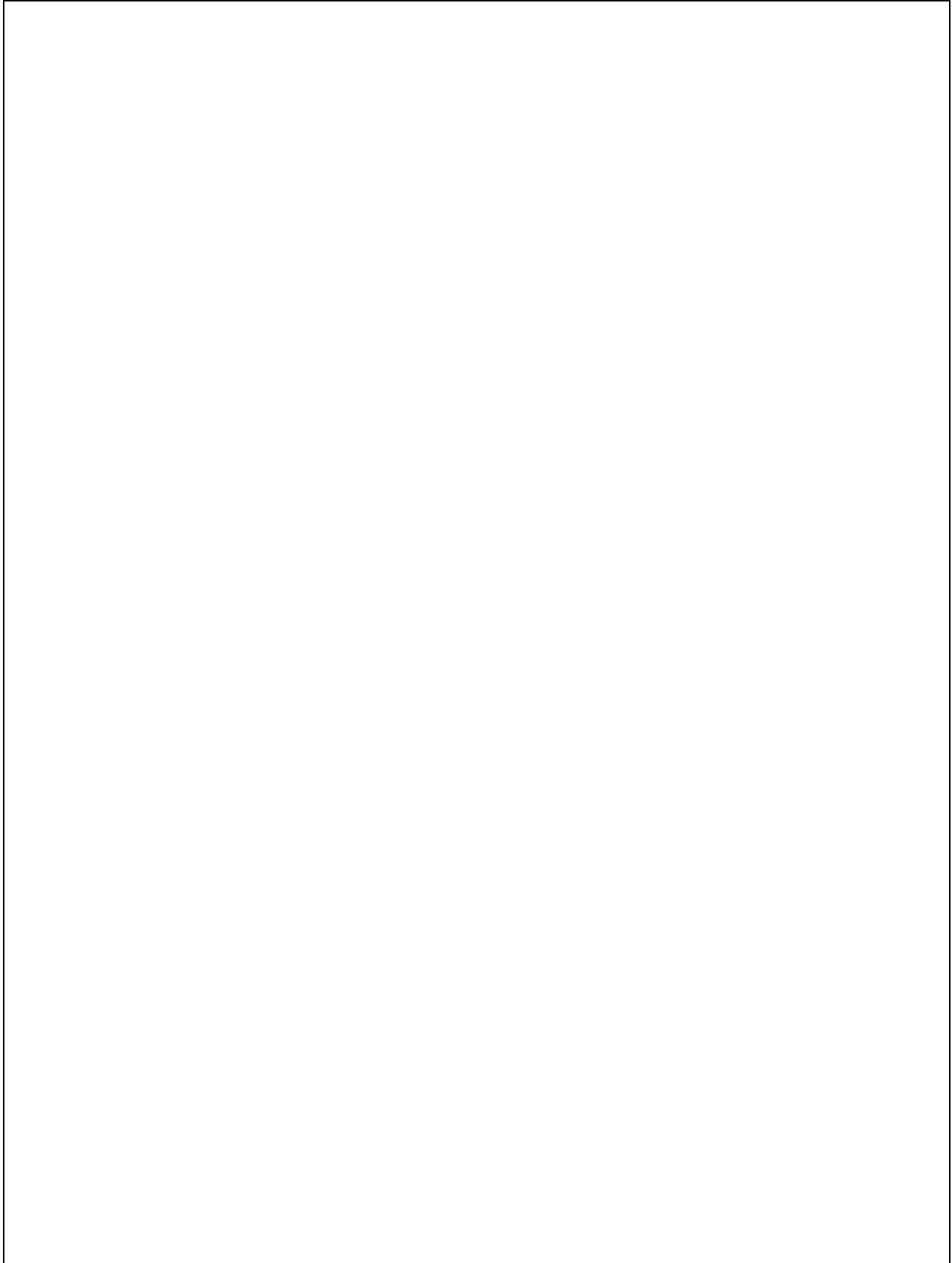
- |   |                  |   |               |   |            |
|---|------------------|---|---------------|---|------------|
|  | Saluran Primer   |  | Rumah Pompa   |  | Pintu Air  |
|  | Saluran Sekunder |  | Genangan      |  | Trash Rack |
|  | Saluran Tersier  |  | Kolam Retensi |  | dst        |

**1C. PETA LAND SUBSIDENCE (PENURUNAN LAHAN)**

**FORM - 1c**

**KOTA/KAB :** \_\_\_\_\_

**PROVINSI :** \_\_\_\_\_



## 2 DATA SALURAN

**FORM -2**

Nama Ruas / Lokasi : .....

Lembar ke : .... Dari .....

NO			URAIAN	RENCANA/ KRITERIA	KONDISI LAPANGAN & PERMASALAHAN	SARAN & RENCANA TINDAK TURUN TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1		Nama Pelaksana			
	2		Dimensi	Dari DED:	Dari As Built Drawing / Kondisi di Lapangan	
		a	Panjang (m)	...../.....	...../.....	
		b	Lebar dasar Hulu / Hilir (m)	...../.....	...../.....	
		c	Lebar atas Hulu / Hilir (m)	...../.....	...../.....	
	3		Elevasi			
		a	Elevasi dasar Hulu / Hilir (m)	...../.....	...../.....	
		b	Elevasi Puncak Tanggul Hulu / Hilir (m)	...../.....	...../.....	
		c	Elevasi Banjir Hulu / Hilir (m)	...../.....	...../.....	
	4		Kapasitas			
		a	Design Run Off (m <sup>3</sup> /det)			
		b	Kapasitas Saluran Hulu/Hilir	...../.....	...../.....	
	5		Bahan Bangunan (beton, batu kali, dsb)			
	6		Keberadaan Sedimentasi di Saluran	Tidak Ada	[ ] Banyak [ ] Sedang [ ] Sedikit	
	7		Keberadaa Sampah di Saluran	Tidak Ada	[ ] Banyak [ ] Sedang [ ] Sedikit	
	8		Kualitas air di saluran (visual)	Bersih	[ ] Sangat Keruh [ ] Keruh [ ] Bersih	
	9		Sengketa Lahan	Tidak Ada	[ ] Ada [ ] Tidak Ada	



### 3 DATA KOLAM

FORM -3

Nama Kolam/Lokasi : .....

Lembar ke : .... Dari .....

NO			URAIAN	RENCANA/ KRITERIA	KONDISI LAPANGAN & PERMASALAHAN	SARAN & RENCANA TINDAK TURUN TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1		Nama Pelaksana			
	2		Dimensi	Dari DED:	Dari As Built Drawing / Kondisi di Lapangan	
		a	Panjang Estimasi (m)			
		b	Lebar Estimasi (m)			
	3		Elevasi			
		a	Elevasi dasar (m)			
		b	Elevasi Puncak Tanggul (m)			
		c	Elevasi Banjir (m)			
	4		Kapasitas			
		a	Luas Genangan (ha)			
		b	Volume Genangan (m <sup>3</sup> )			
	5		Bahan Bangunan (beton, batu kali, dsb)			
	6		Keberadaan Sedimentasi di Kolam	Tidak Ada	[ ] Banyak [ ] Sedang [ ] Sedikit	
	7		Keberadaan Sampah di Kolam	Tidak Ada	[ ] Banyak [ ] Sedang [ ] Sedikit	
	8		Kualitas air di saluran (visual)	Bersih	[ ] Sangat Keruh [ ] Keruh [ ] Bersih	
	9		Sengketa Lahan	Tidak Ada	[ ] Ada [ ] Tidak Ada	

#### 4 DATA RUMAH POMPA

**FORM -4**

Nama Rumah Pompa/Lokasi : .....

Lembar ke : .... Dari .....

NO			URAIAN	RENCANA/ KRITERIA	KONDISI LAPANGAN & PERMASALAHAN	SARAN & RENCANA TINDAK TURUN TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1		Nama Pelaksana			
	2		Dimensi	Dari DED:	Dari As Built Drawing / Kondisi di Lapangan	
		a	Panjang Rumah Pompa (m)			
		b	Lebar Rumah Pompa (m)			
	3		Elevasi			
		a	Elevasi Inlet Pompa (m)			
		b	Elevasi Outlet Pompa (m)			
	4		Kapasitas			
		a	Jumlah Pompa (buah)			
		b	Kapasitas Pompa (liter/det)			
		c	Jenis Pompa			
	5		Bahan Bangunan (beton, batu kali, dsb)			
	6		Kondisi Elektrikal			
		a	Jumlah Genset (buah)			
		b	Kapasitas Genset (Watt)			
		c	Daya Listrik PLN (Watt)			
	7		Lebar/ Tinggi Saringan Sampah (m)			
	8		SOP	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	9		Keberadaan Sedimentasi	Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Sedikit	
	10		Keberadaan Sampah	Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Sedikit	
	11		Kualitas air di saluran (visual)	Bersih	<input type="checkbox"/> Sangat Keruh/Berbusa <input type="checkbox"/> Keruh <input type="checkbox"/> Bersih	
	12		Sengketa Lahan	Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	

## 5 DATA PINTU AIR

**FORM -5**

Nama Pintu Air/Lokasi : .....

Lembar ke : .... Dari .....

NO			URAIAN	RENCANA/ KRITERIA	KONDISI LAPANGAN & PERMASALAHAN	SARAN & RENCANA TINDAK TURUN TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1		Nama Pelaksana			
	2		Dimensi	Dari DED:	Dari As Built Drawing / Kondisi di Lapangan	
		a	Lebar (m)			
		b	Tinggi (m)			
		c	Jumlah Pintu Air (Buah)			
	3		Elevasi			
		a	Elevasi Dasar Pintu (m)			
		b	Elevasi Buka Normal Pintu (m)			
		c	Elevasi Buka Maksimum Pintu (m)			
	4		Kapasitas			
		a	Jeis Pintu Air			
		b	Kedalaman Air di Hilir Pintu (m)			
		c	Kedalaman Air di Hulu Pintu (m)			
	5		Bahan Pintu (Besi, Kayu, dsb)			
	6		Kondisi Elektrikal			
		a	Jumlah Genset (buah)			
		b	Kapasitas Genset (Watt)			
		c	Daya Listrik PLN (Watt)			
	7		Operasional (Manual/Otomatis/Semi)			
	8		SOP	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	9		Keberadaan Sedimentasi	Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Sedikit	
	10		Keberadaan Sampah	Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Sedikit	
	11		Kualitas air di saluran (visual)	Bersih	<input type="checkbox"/> Sangat Keruh/Berbusa <input type="checkbox"/> Keruh <input type="checkbox"/> Bersih	
	12		Sengketa Lahan	Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	

## 6 DATA GENANGAN

FORM - 6

Dilakukan melalui wawancara dengan Aparat & Masyarakat

NO			URAIAN	RENCANA/ KRITERIA	KONDISI LAPANGAN & PERMASALAHAN	SARAN & RENCANA TINDAK TURUN TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1		Genangan	Tidak ada Genangan	Terjadi Genangan	
		a	Lokasi Genangan	Tidak ada Genangan	Gambar Sketsa di sistem jaringan drainase:	
		b	Luas Genangan	Tidak ada Genangan	<input type="checkbox"/> < 1 ha <input type="checkbox"/> 1-5 ha <input type="checkbox"/> > 5 ha	
		c	Tinggi Genangan	Tidak ada Genangan	<input type="checkbox"/> < 30 cm <input type="checkbox"/> 30-60 cm <input type="checkbox"/> > 60 cm	
		a	Lama Genangan	Tidak ada Genangan	<input type="checkbox"/> < 1 jam <input type="checkbox"/> 1-6 jam <input type="checkbox"/> 6-24 jam <input type="checkbox"/> > 24 jam	
		b	Kejadian Genangan	Tidak ada Genangan	<input type="checkbox"/> Setiap Tahun <input type="checkbox"/> 1-5 Tahun Sekali <input type="checkbox"/> > 5 Tahun sekali	
	2		Penanganan Genangan	Tidak ada Genangan	<input type="checkbox"/> dibiarkan <input type="checkbox"/> dibuat tanggul banjir <input type="checkbox"/> Dipompa	
	3		Penyebab Genangan	-	<input type="checkbox"/> Sampah <input type="checkbox"/> Sedimentasi <input type="checkbox"/> Dimensi Saluran Kurang <input type="checkbox"/> Dana o&p Kurang/Belum Ada	

**7 ASPEK PERUNDANGAN PRASARANA & SARANA DRAINASE**
**FORM - 7**

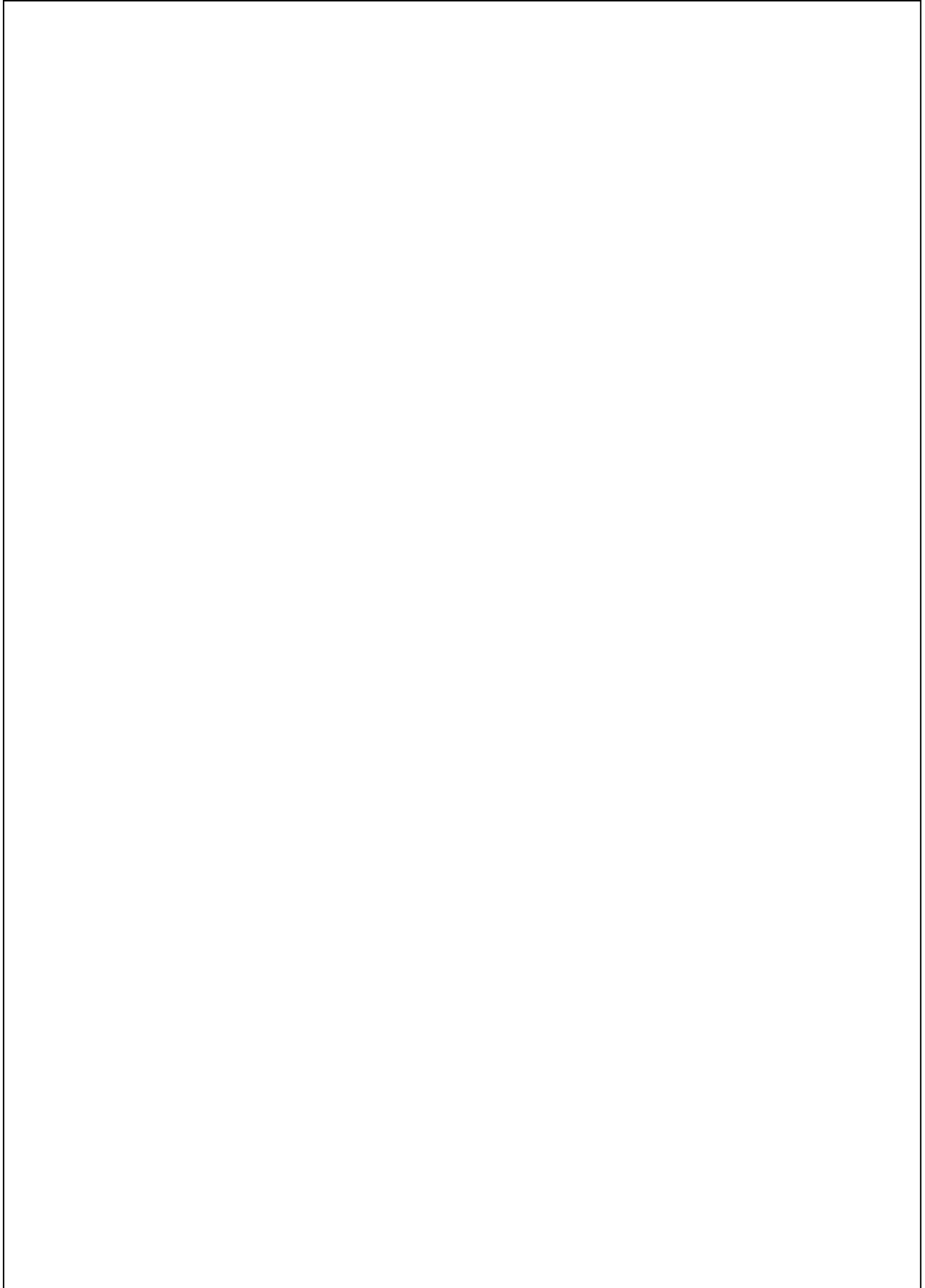
NO			URAIAN	RENCANA/ KRITERIA	KONDISI LAPANGAN & PERMASALAHAN	SARAN & RENCANA TINDAK TURUN TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1		Kebijakan Daerah yang sudah dibuat:	Data dari Perundangan/ Kebijakan Daerah		
		a	Saluran	Ada	<input type="checkbox"/> Perda <input type="checkbox"/> Pergub <input type="checkbox"/> .....	
		b	Kolam Retensi	Ada		
		c	Rumah Pompa	Ada		
		d	Pintu Air	Ada		
		e	Persampahan	Ada		
		f	Sumur Resapan	Ada	<input type="checkbox"/> Perda <input type="checkbox"/> Pergub <input type="checkbox"/> .....	
		g	Ruang Terbuka Hijau	Ada	<input type="checkbox"/> Perda <input type="checkbox"/> Pergub <input type="checkbox"/> .....	
	2		Apakah Kebijakan tersebut di atas telah disosialisasikan ke masyarakat?	Sudah Disosialisasikan	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Belum	
	3		Dalam bentuk apa Kebijakan Daerah Tersebut Disosialisasikan	<input type="checkbox"/> Iklan Layanan Masyarakat <input type="checkbox"/> Brosur <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Iklan Layanan Masyarakat <input type="checkbox"/> Brosur <input type="checkbox"/> .....	
	4		Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Kebijakan Tersebut?	<input type="checkbox"/> Harus Dipatuhi	<input type="checkbox"/> Patuh <input type="checkbox"/> Kurang Patuh <input type="checkbox"/> Diabaikan	
	5		Apakah Sanksi atas Kebijakan Daerah Tersebut sudah dijalankan?	<input type="checkbox"/> Harus Dijalankan	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum Pernah	
	6		Jika "Sudah, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sanksi tersebut?		<input type="checkbox"/> Menjadi Jera <input type="checkbox"/> Tidak Jera	
	7		Apakah Pemda sudah Membuat "Sumur Resapan"?	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum	
	8		Apakah Masyarakat sudah membuat "Sumur Resapan" di lahannya masing- masing?		<input type="checkbox"/> > 75% <input type="checkbox"/> < 25% <input type="checkbox"/> Belum Ada	

**8. STRUKTUR ORGANISASI O&P**

**FORM - 8**

**KOTA/KAB :** \_\_\_\_\_

**PROVINSI :** \_\_\_\_\_



**9 SDM PELAKSANA O&P**

**FORM - 9**

NO			URAIAN	RENCANA/ KRITERIA	KONDISI LAPANGAN & PERMASALAHAN	SARAN & RENCANA TINDAK TURUN TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1		Jumlah Tenaga Pelaksana O&P	Dari Data MP/O&P ..... orang	..... orang	
	2		Apakah jumlah tenaga pelaksana tersebut sudah mencukupi?	Cukup	<input type="checkbox"/> Kebanyakan <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang	
	3		Apakah keahlian SDM sesuai dengan tuntutan tugas?	Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
	4		Bagaimana Dukungan Pemda Setempat terhadap Anggaran O&P?	-	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Belum Ada	
	5		Pendidikan SDM Pelaksana O&P	-	[ ..... ] Sarjana [ ..... ] Diploma [ ..... ] SLTA [ ..... ] SLTP [ ..... ] SD	
	6		Apakah SDM yang ada perlu ditingkatkan ketrampilannya?	-	<input type="checkbox"/> Perlu <input type="checkbox"/> Belum Perlu	
	7		Jika "Perlu", dimana Diklat/Kursus tersebut dilakukan?	-	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Provinsi <input type="checkbox"/> Kabupaten/Kota	

**10 PERAN MASYARAKAT**

**FORM - 10**

NO			URAIAN	RENCANA/ KRITERIA	KONDISI LAPANGAN & PERMASALAHAN	SARAN & RENCANA TINDAK TURUN TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1		Pemeliharaan Prasarana & Sarana Drainase	Dari data O & P / Perundangan		
		a	Saluran Drainase			
		b	Kolam Retensi			
		c	Rumah Pompa			
		d	Pintu Air			
		e	O & P			
	2		Pembiayaan / dikelola oleh Masyarakat			
		a	Saluran Drainase			
		b	Kolam Retensi			
		c	Rumah Pompa			
		d	Pintu Air			
		e	O & P			
	3		Pemanfaatan air drainase			
		a	Ternak/Tambak			
		b	Industri			
		c	Lannya			



**11 DATA LAINNYA**
**FORM - 11**

NO			URAIAN	RENCANA/ KRITERIA	KONDISI LAPANGAN & PERMASALAHAN	SARAN & RENCANA TINDAK TURUN TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1		DATA LAIN	Data dari Pengelola Drainase/BAPPEDA		
		a	Bukti Surat Pembebasan Lahan	Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Dalam Proses (Ada Draft)	
		b	Bukti Pernyataan Kesiapan Penggunaan Lahan	Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Dalam Proses (Ada Draft)	
		c	Surat Pernyataan Pemdand	Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Dalam Proses (Ada Draft)	
		d	Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Aset	Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Dalam Proses (Ada Draft)	
		e	Analisa Dampak Lingkungan	Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Dalam Proses (Ada Draft)	
	2		DATA KOMITMEN DAERAH			
		a	Data Daerah Untuk Pembangunan Bersama (DDUPD)	Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Dalam Proses (Ada Draft)	
		b	Surat Serah Terima Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase	Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Dalam Proses (Ada Draft)	
		c	Surat Permintaan Pengalihan Aset untuk Dapat Dikelola Kab./Kota	Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Dalam Proses (Ada Draft)	

## 12 PENGUMPULAN DATA PELENGKAP

Data pelengkap yang diperlukan untuk analisis teknis (jika ada) adalah:

NO	NAMA DATA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Data Curah hujan harian maksimal (R24), minimal 10 tahun terakhir	Dinas PU/ Meteorologi Geofisika/Bandara	
2	Data intensitas hujan jam-jaman maksimal (I), minimal 10 tahun terakhir	Dinas PU/ Meteorologi Geofisika/Bandara	
3	Data debit banjir harian maksimal di sungai/saluran, minimal 10 tahun terakhir	Dinas PU/ Balai Besar SDA/ BWS	
4	Data lengkap dimensi saluran di dalam sistem drainase, meliputi:	Masterplan Drainase/DED	
	a. Saluran:		
	• Gambar skema lokasi dalam sistem drainase		
	• Nama ruas / potongan		
	• Elevasi dasar saluran (hulu dan hilir)		
	• Elevasi puncak tanggul (hulu dan hilir)		
	• Lebar dasar saluran		
	• Lebar atas saluran		
	• DPSal masing-masing ruas saluran		
	b. Gorong-gorong:		
	• Gambar skema lokasi dalam sistem drainase		
	• Elevasi dasar gorong-gorong/jembatan (hulu & hilir)		
	• Lebar gorong-gorong/jembatan		
	• Tinggi gorong-gorong/jembatan		
	c. Kolam Retensi		
	• Gambar skema lokasi dalam sistem drainase		
	• Kurva Lengkung debit ketinggian vs Luas vs Volume		
	[H(m) vs A(m <sup>2</sup> ) vs V (m <sup>3</sup> )]		

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini  
NIP. 195803311984122001

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO

